

Abstrak

Kebijakan Pendaftaran Tanah adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pendaftaran tanah yang baik. Karena memiliki sertifikat tanah sangat diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan masalah atau perkara-perkara mengenai tanah.

Tujuan dari penelitian ini adalah; a) Untuk mengetahui dan menganalisis alasan masih banyak masyarakat Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang tidak mendaftarkan tanahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; b) Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat desa Sruwen terhadap bukti kepemilikan Sertipikat dan Leter C; c) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah setempat (Kantor Pertanahan) meningkatkan niat masyarakat untuk mendaftarkan di Kabupaten Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan penelitian langsung ke objek yaitu untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis* atau penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap perbedaan yang berarti dengan bukti sertipikat dari tanah dengan tidak memiliki sertipikat atas tanahnya.

Kesimpulan penelitian ini adalah agar proses mewujudkan Kesadaran Masyarakat Dalam Mendaftarkan Tanah berjalan dengan lancar harus dilakukan sosialisasi, evaluasi dan pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dan proses pelaksanaan di lapangan guna mengatasi kendala-kendala yang ada.

Kata kunci: *Pendaftaran Tanah, Kesadaran Hukum Masyarakat, Sosialisasi Hukum Pendaftaran Tanah*

Abstract

Land Registration Policy is the policy of the Indonesian government in order to realize good land registration governance. Because having a land certificate is very mandatory to avoid things that cause problems or cases regarding land. Tenganan District, Semarang Regency.

The purpose of this research is; a) To find out and to analyze the reasons why there are still many people of Sruwen Village, Tenganan District, Semarang Regency who have not registered their land in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration; b) To find out and analyze the perception of the people of Sruwen village on proof of ownership of the Certificate and Letter C; c) To find out and analyze the efforts of the local Government (Land Office) to increase the community's intention to register in Semarang Regency.

This study uses an empirical juridical approach that emphasizes research aimed at obtaining legal knowledge empirically by direct research into objects that is to find out the legal awareness of the people of Sruwen Village, Tenganan District, Semarang Regency. This study uses descriptive analytical descriptive research or descriptive research intended to provide as detailed data as possible about humans, circumstances, or other symptoms.

Based on the results of research communities do not have a good understanding of the meaningful differences with proof of certificates from the land with no certificate of land.

The conclusion of this research is that the process of realizing Community Awareness in Registering Land runs smoothly, socialization, evaluation and supervision must be carried out by the Regional Government of the community and the implementation process in the field in order to overcome existing obstacles.

Keywords: Land Registration, Community Legal Awareness, Legal Registration